#### Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

#### Program Kampung KB dan Pemberdayaan Masyarakat

Oleh: Fachrur Rozi Publikasi Pada Koran Haluan, 21 September 2018

Akhir-akhir ini istilah Kampung KB telah menjadi icon yang cukup populer untuk diperbincangkan oleh beberapa kalangan masyaralat. Tidak hanya dikalangan para pengelola program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dalam hal ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), akan tetapi topik ini juga banyak diperbincangkan oleh lembaga-lembaga departemen maupun non-departemen mulai dari tingkat daerah sampai ketingkat pusat.

Seperti halnya Pemerintah Kota Padang yang telah menjadikan pembangunan kampung KB bukan hanya untuk mengatasi masalah kependudukan saja. Namun program ini juga dijadikan sebagai upaya untuk menggali potensi yang dimiliki masyarakat dan sebagai bentuk usaha untuk meningkatan perekonomian masyarakat.

Pada tahun 2016 lalu, Pemerintah Kota Padang telah menetapkan 12 Kampung KB di Kota Padang. Di setiap kampung KB telah terbentuk Kelompok Bina Keluarga (KBK), KBK-Remaja, KBK-Lansia, Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja, dan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).

Untuk saat ini terdapat dua Kelurahan yang dijadikan sebagai Kampung KB percontohan di Kota Padang. Dua Kelurahan itu adalah Gunung Pangilun dan Bungus. Dua Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai Kampung KB percontohan di Kota Padang itu tidak hanya fokus untuk mengendalikan peningkatan jumlah penduduk, namun juga difokuskan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat.

Masyarakat yang masuk kedalam kategori pra-sejahtera didorong untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan berusaha untuk meningkatkan taraf ekonomi. Sampai saat ini dua Kelurahan tersebut memiliki beberapa kegiatan yang diinisiasi dari Kampung KB. Kegiatan itu seperti pelatihan salon, budidaya tanaman hidroponik, dan budi daya ikan terpal.

Kita patut memberikan apresiasi kepada pemerintah terkait upaya yang dilakukan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sudah seharusnya usaha yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dimulai dari organisasi informal, tingkat bawah dan pertama yaitu keluarga.

Pada prinsipnya Kampung KB dibangun untuk melaksanakan delapan fungsi keluarga. Kedelapan fungsi itu antara lain membuat keluarga bahagia, sejahtera, terbebas dari kemiskinan, mengentaskan kebodohan, dan melepaskan dari keterbelakangan.

## Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

Kita tentu perlu mengetahui dan memahami apa yang melatarbelakangi pemerintah menggaungkan kembali program KB yang diwujudkan dalam bentuk Kampung KB. Program Kampung KB dicanangkan oleh Pemerintah Pusat pada bulan Januari 2016. Terdapat beberapa hal yang melatarbelakangi penetapan program ini yaitu *pertama*, Pemrintah Pusat menilai pada saat ini program KB tidak lagi bergema dan terdengar gaungnya seperti pada era Orde Baru,

*Kedua,* adanya keinginan dari Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. *Ketiga,* Pemerintah berusaha melakukan penguatan program KKBPK yang dikelola dan diselenggarakan dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.

Keempat, Pemerintah Pusat ingin mewujudkan cita-cita pembangunan Indonesia yang tertuang dalam Nawacita terutama agenda prioritas ke 3 yaitu "Memulai pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan". Kemudian juga untuk mewujudkan agenda prioritas ke 5 yaitu "Meningkatkan kualitas hidup masyarakat Indonesia".

Kelima, Pemerintah sedang berupaya untuk mengangkat dan menggairahkan kembali program KB guna menyongsong tercapainya bonus demografi yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2010-2030. Sehingga diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk.

Jika kita telaah Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sebagai dasar pelaksanaan Program Kependudukan dan Keluarga Berencana, terdapat penekanan terhadap kewenangan yang dimiliki oleh BKKBN untuk tidak memfokuskan hanya pada masalah pengendalian penduduk saja, namun juga pada masalah pembangunan keluarga.

Maka dari itu, untuk menjawab tantangan tersebut pemerintah menggagas program Kampung KB. Melalui wadah Kampung KB ini nantinya diharapkan pelaksanaan program KKBPK dan program-program pembangunan lainnya dapat berjalan secara terpadu dan bersinergi satu dengan yang lainnya.

Tujuan kebijakan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program Kampung KB ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas.

Kemudian tujuan pembentukan program Kampung KB secara khusus selain untuk meningkatkan peran serta pemerintah, lembaga non pemerintah dan swasta dalam mendampingi dan membina masyarakat untuk menyelenggarakan program KKBPK dan

## Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

pembangunan sektor terkait, juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat yang berkaitan dengan persoalan pembangunan berwawasan kependudukan

Pada prinsipnya program Kampung KB merupakan perwujudan dari sinergi antara beberapa kementerian terkait dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, mitra kerja, dan pemangku kepentingan, serta tidak ketinggalan partisipasi langsung masyarakat setempat.

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam program ini. Hal ini karena Pemerintah menjadikan masyarakat sebagai subjek dalam pembangunan melalui program Kampung KB. Untuk menentukan wilayah yang akan dijadikan sebagai Kampung KB, wilayah tersebut harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditentukan. Kriteria itu seperti wilayah yang dijadikan Kampung KB harus memiliki kebutuhan tinggi atau masyarakat ekonomi pra-sejahtera.

Dilibatkannya masyarakat secara aktif dalam program Kampung KB, setidaknya telah mencerminkan tindakan pemberdayaan masyarakat. Namun kita juga harus betul-betul memahami apakah program Kampung KB yang terjadi di lapangan itu dapat dikatakan sebagai pemberdayaan masyarakat secara komprehensif atau tidak.

Secara konseptual Jim Ife (1995) mengungkapkan bahwa pemberdayaan ditujukan untuk meningkatkan kekuasaan (power) dari kelompok masyarakat yang kurang beruntung (disadvantaged). Defenisi ini mengartikan konsep pemberdayaan (empowerment) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin.

Jika pelaksanaan program Kampung KB di suatu wlayah dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat tanpa intervensi dari pemerintah, maka program ini dapat dikatakan telah memenuhi konsep defenisi dari pemberdayaan masyarakat. Namun jika terjadi penyimpangan dari yang seharusnya, maka diperlukan evaluasi agar program ini betulbetul dapat dikatakan sebagai wujud dari pemberdayaan masyarakat.

Setidaknya ada 3 strategi yang bisa diterapkan dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu Perencanaan dan kebijakan (policy and planning). Perencanaan dan kebijakan yang berpihak dapat dirancang untuk menyediakan sumber kehidupan yang cukup bagi masyarakat untuk mencapai keberdayaan. Kedua, Aksi sosial dan politik (sosial dan political action). Adanya keterlibatan masyarakat secara politik membuka peluang dalam memporoleh kondisi keberdayaan dengan mengubah sistem politik yang tertutup menjadi sistem yang demokratis dan terbuka.

Terakhir adalah Peningkatan kesadaran dan pendidikan. Salah satu tujuan yang ingin dicapai dari peningkatan pendidikan masyarakat ini adalah untuk memberi sarana dan

# Rancak Publik Foundation (Rumah Kajian Perencanaan dan Kebijakan Publik)

skill agar mencapai perubahan secara efektif. Oleh karena itu, agar program Kampung KB yang dilaksanakan dapat memberdayakan masyarakat secara maksimal, Pemerintah dapat memilih dan menggunakan konsep strategi pemberdayaan masyarakat yang ada.